

OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI PERENCANAAN PARTISIPATIF SEBAGAI UPAYA PEMANFAATAN DANA DESA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi¹, Ni Luh Gede Erni Sulindawati², Luh Gede Kusuma Dewi³, Putu Dany Indrawan Sidhi⁴, Komang Puja Astana⁵, Ni Kadek Meila Anggraeni⁶

¹Jurusan Ekonomi dan Akuntansi FE UNDIKSHA; ²Jurusan Ekonomi dan Akuntansi FE UNDIKSHA; ³Jurusan Ekonomi dan Akuntansi FE UNDIKSHA; ⁴Jurusan Ekonomi dan Akuntansi FE UNDIKSHA; ⁵Jurusan Ekonomi dan Akuntansi FE UNDIKSHA; ⁶Jurusan Ekonomi dan Akuntansi FE UNDIKSHA;
Email: ayu.wulan@undiksha.ac.id

ABSTRACT

Village Development Planning is a guideline in preparing the Village Revenue and Expenditure Budget. In an effort to utilize village funds effectively and efficiently, the plans prepared must be in accordance with the needs of the community and the conditions of the village. For this reason, optimal participation from community members is needed in the form of active involvement in village development planning deliberation. The community service program carried out aims to increase the understanding of the community and village officials through participatory planning training and assistance. This program is implemented in the form of training and assistance in the preparation of village development planning through participatory planning. The result of this activity is an increase in the understanding of community members about the preparation of village development plans, which has an impact on increasing community participation in village development planning deliberation. The target of this activity is to increase the commitment of the community to be actively involved in village development planning as well as the commitment of village officials to always be open, responsive, and accountable in village development planning so that the proposed development plan is in accordance with the needs of the community.

Keywords: *village development planning, participatory planning*

ABSTRAK

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam upaya pemanfaatan dana desa yang efektif dan efisien maka perencanaan yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi Desa. Untuk itu diperlukan partisipasi yang optimal dari warga masyarakat dalam bentuk keterlibatan aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa melalui pelatihan dan pendampingan perencanaan partisipatif. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui perencanaan partisipatif. Hasil kegiatan ini berupa meningkatnya pemahaman warga masyarakat tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa, yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Target capaian kegiatan ini adalah meningkatnya komitmen dari masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan pembangunan desa serta komitmen perangkat desa untuk senantiasa terbuka, responsif, dan akuntabel dalam perencanaan pembangunan desa sehingga perencanaan pembangunan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: *perencanaan pembangunan desa, perencanaan partisipatif*

PENDAHULUAN

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan dokumen yang mengandung program kegiatan

untuk mencapai tujuan ataupun target sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Pada umumnya, perencanaan pembangunan desa diawali dengan Musrenbang. Musrenbang itu

sendiri merupakan forum komunikasi yang melibatkan berbagai komponen penting dalam masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, kepala desa, Kasi Pemberdayaan Pemerintah Desa, Badan permusyawaratan Desa, serta Lembaga Kemasyarakatan untuk merencanakan pembangunan berkelanjutan. Namun, pada pelaksanaan Musrenbang yang seharusnya ditahap awal dilakukan agenda sosialisasi pada masyarakat untuk menjaring dari pada aspirasi masyarakat di tingkat Desa sering kali belum sepenuhnya telah dilakukan (Haryadi, 2016). Banyak ditemukan fenomena terkait masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa (Manolang, 2013; Muda & Batubara, 2021). Adam Latif, dkk (2019) juga memaparkan bahwa pada forum musyawarah tidak semua peserta berperan aktif melainkan sebagian hanya datang dan mendengarkan saja dan hal ini berdampak pada tingkat partisipasi yang tidak sesuai harapan, dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan bentuk partisipasi, transparansi, akuntabel, dan program berkelanjutan sehingga partisipasi yang merupakan pondasi awal adalah poin penting yang harus terpenuhi.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintahan desa atau kepala desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa di beri peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri (Dema & Ratna, 2020).

Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 354 ayat 1 bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat maka pemerintahan daerah (a) menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat,

(b)mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat, (c) mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi masyarakat dapat terlibat secara aktif, dan atau kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.

Dengan adanya program-program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri seraya memetik hasil program tersebut (Dema & Ratna, 2020). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat tercermin pada tahap perencanaan atau keikutsertaannya dalam kegiatan musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Dalam hal perencanaan pembangunan untuk pengambilan keputusan haruslah senantiasa melihat dan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Laily, 2015). Untuk dapat lebih memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan, diperlukannya sosialisasi atas pedoman dan teknik pelaksanaan musyawarah pembangunan kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat mampu memahami pentingnya partisipasi mereka dalam pembangunan untuk kesejahteraan mereka tentunya dengan upaya yang dilakukan berupa melaksanakan pembangunan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat (Effendi, 2020).

Berdasarkan hasil survei awal oleh tim pengabdian kepada Perbekel Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada hari Selasa, 15 Februari 2022, disepakai untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan perencanaan partisipatif dengan penandatanganan pernyataan kerjasama mitra dengan Perbekel Desa Wanagiri, seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Penandatanganan Pernyataan Kesediaan Kerja Sama

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan informasi yang diperoleh dari perangkat desa bahwa masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang disebabkan oleh masih rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Selama ini, kegiatan perencanaan pembangunan masih diserahkan saja kepada perbekel desa dan aparat pemerintah desa, serta warga masyarakat belum banyak terlibat dalam kegiatan tersebut. Seringkali para perangkat desa yang terjun langsung ke masyarakat untuk menanyakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil wawancara awal, dijelaskan bahwa masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan desa. Dampak dari perencanaan yang belum partisipatif adalah manfaat pembangunan belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, padahal pelaksanaan pembangunan desa belum dapat dikatakan berhasil apabila masih ada sebagian warga masyarakat yang belum merasakan manfaat dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Berdasarkan analisis situasi, permasalahan pada masyarakat di Desa Wanagiri dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pemahaman warga masyarakat terkait proses penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa

Berbagai persoalan tersebut membutuhkan penanganan antara lain melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan aparatur desa dalam menyusun rencana pembangunan desa. Dengan terpetakannya persoalan desa dan pembangunan dengan melibatkan lembaga-lembaga dan kelompok masyarakat yang ada di desa, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi meningkat.

Sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, tim pengabdian mengajak perwakilan kelompok masyarakat di Desa Wanagiri, beserta pemerintah desa (perbekel desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa) untuk belajar bersama-sama tentang perencanaan pembangunan desa yang partisipatif melalui program kegiatan edukasi, pelatihan, dan pendampingan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman warga masyarakat tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa, selanjutnya dapat meningkatkan peran serta atau partisipasi warga masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, sehingga pembangunan desa yang akan dilaksanakan diharapkan dapat benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang yang berdampak pada hasil pembangunan desa tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga masyarakat Desa Wanagiri.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tiga tahapan, yakni:

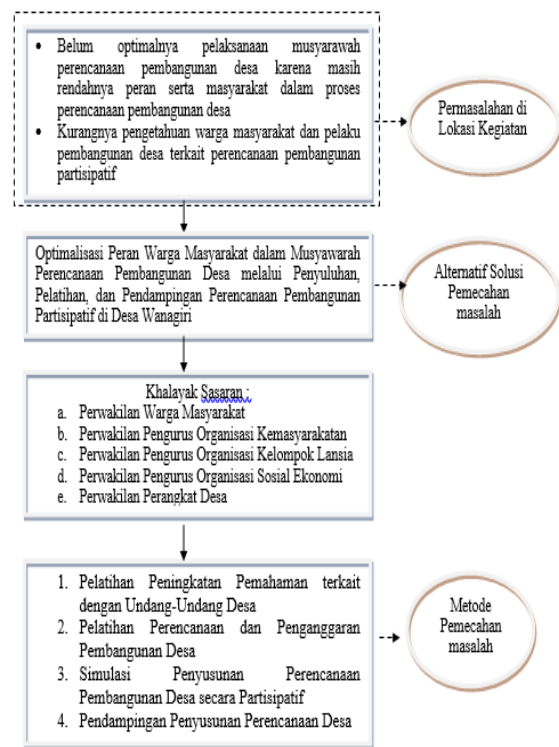
- a. Tahap Persiapan
- b. Tahap Pelaksanaan
- c. Tahap Evaluasi

Tahap persiapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan, koordinasi dengan Perangkat Desa Wanagiri, Penyiapan materi edukasi dan pelatihan, penyiapan narasumber, penyiapan jadwal pelatihan, dan penyiapan kelengkapan lainnya.

Tahap Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan tentang perencanaan partisipatif di Desa Wanagiri yang dilaksanakan pada bulan Agustus-September. Metode kegiatan yang digunakan dalam kegiatan ini berupa pelatihan dan pendampingan. Pelatihan diberikan kepada perwakilan kelompok masyarakat dan perangkat desa Wanagiri. Untuk tercapainya tujuan kegiatan ini digunakan ceramah, diskusi, dan konsultasi. Tahap implementasi kegiatan ini adalah:

- a. Pemberian pengetahuan tentang Undang-Undang Desa, Permendagri tentang Pembangunan Desa, serta siklus pengelolaan keuangan Desa
- b. Pemberian pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa sebagai dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Pemberian Simulasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah perwakilan kelompok masyarakat dan perangkat desa. Untuk dapat menjawab permasalahan yang terjadi dan mewujudkan tujuan dari kegiatan ini maka kerangka pemecahan masalah dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemecahan Masalah

Dalam tahap evaluasi yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan evaluasi pemahaman warga masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa.
- b. Melakukan evaluasi tingkat kesadaran warga masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif.

Rancangan evaluasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini terdiri dari evaluasi proses dan produk. Evaluasi proses meliputi aktivitas peserta dalam mengikuti kegiatan, keberhasilan dapat dilihat dari keaktifan dalam bertanya dan berdiskusi, sedangkan evaluasi hasil mencakup beberapa hal, yakni: (1) peningkatan pemahaman warga masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa, (2) peningkatan kesadaran warga masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Indikator keberhasilan kegiatan ini diadaptasi dan dikembangkan dari Susetawan, dkk (2018) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rancangan Evaluasi

No.	Rincian
1	Peningkatan Pemahaman warga masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa
2	Terbangunnya komitmen warga masyarakat untuk berani menyampaikan ide/usulan pada forum publik/musyawarah desa, khususnya dalam hal perencanaan pembangunan desa
3	Terbangunnya komitmen organisasi warga untuk mulai mempraktikkan dan mendiskusikan tata cara perencanaan pembangunan desa
4	Terbangunnya komitmen aparat pemerintahan desa untuk terbuka, responsif, dan akuntabel dalam perencanaan pembangunan desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat yakni melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan penyusunan agenda pemecahan, turut memantau implementasi, serta ikut aktif melakukan evaluasi. Peran masyarakat sangat diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan amanat peraturan perundangan-undangan yang mewajibkan desa untuk mengundang dan menghadirkan unsur-unsur masyarakat Desa. Dengan adanya perencanaan pembangunan yang partisipatif, maka manfaat pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat dikatakan berhasil apabila semua warga masyarakat merasakan manfaat dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Pemahaman masyarakat yang memadai tentang perencanaan pembangunan desa sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa. Untuk itu, dilaksanakannya kegiatan pelatihan dan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman warga masyarakat dan perangkat

desa terkait proses penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa sehingga hasil pembangunan tersebut mencerminkan prinsip partisipatif, yaitu melibatkan seluruh warga masyarakat.

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum dan data yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, pelatihan, dan pendampingan. Kegiatan ini merupakan pengabdian dalam upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat turut ikut serta secara aktif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan sehingga perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang berdampak pada hasil dari perencanaan pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat desa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan tahap persiapan yakni penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan, koordinasi dengan perangkat desa di Desa Wanagiri, penyiapan materi pelatihan, penyiapan narasumber, dan penyiapan jadwal pelatihan. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman warga masyarakat dan perangkat desa tentang perencanaan partisipatif.

1. Kegiatan Edukasi

Pada tahap awal kegiatan, perwakilan kelompok masyarakat dan perangkat desa diberikan materi terkait dengan siklus pengelolaan keuangan desa yang diawali dengan tahap perencanaan sebagai dasar nantinya dalam menyusun APBdes, Undang-Undang Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, serta Perencanaan Partisipatif. Setelah itu Perwakilan kelompok masyarakat, perangkat desa dan pemateri melakukan diskusi terkait perencanaan pembangunan partisipatif.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kelompok masyarakat, Babinsa, perwakilan pengurus Bumdes, serta Perangkat Desa. Pemaparan

materi ini disampaikan oleh Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, S.E., M.Sc selaku ketua pengabdian. Topik pada materi pertama ini diarahkan pada pentingnya perencanaan yang melibatkan lapisan masyarakat yang ada di Desa termasuk tokoh masyarakat, perwakilan kelompok lansia, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial ekonomi beserta perangkat desa.



Gambar 1. Pemaparan Materi terkait Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Pembangunan Desa secara Partisipatif

Hasil evaluasi yang telah dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman perwakilan kelompok masyarakat tentang perencanaan pembangunan partisipatif dan meningkatnya pemahaman perwakilan kelompok masyarakat serta perangkat desa terkait pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan edukasi terkait perencanaan secara partisipatif, setelah pelaksanaan kegiatan diadakan survei terhadap para peserta untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait perencanaan pembangunan secara partisipatif. Hasilnya menunjukkan bahwa 86,67% peserta mampu menjawab dengan benar pertanyaan terkait perencanaan pembangunan secara partisipatif.

Hasil yang diharapkan dari pemahaman peserta terkait keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa akan menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi bagi

masyarakat, karena yang direncanakan merupakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Desa. Perencanaan partisipatif ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mereka dapat berperan dalam rangka mempercepat pembangunan di desa yang bertujuan agar manfaat dari pembangunan desa dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Desa Wanagiri.

2. Kegiatan Pelatihan

Pelatihan perencanaan pembangunan dan penganggaran secara partisipatif dilakukan berupa simulasi, dimana peserta yang hadir terdiri dari Perbekel dan perangkatnya, serta perwakilan beberapa kelompok masyarakat akan mempraktekan perencanaan pembangunan secara partisipatif dalam musyawarah pembangunan dan kegiatan ini dipandu oleh Luh Gede Kusuma Dewi, S.E., M.Si yang didampingi juga oleh mahasiswa yang tergabung dalam kelompok mahasiswa konsentrasi akuntansi sektor publik dan ketua tim pengabdian. Dalam simulasi ini digunakan metode dengan diagram venn untuk mengidentifikasi permasalahan secara mudah program kerja yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi di Desa.

Dengan menggunakan diagram venn, peserta diminta untuk mendiskusikan permasalahan yang ada di desa dan dilanjutkan merankingnya atau mengurutkan mana yang paling penting untuk segera diselesaikan atau dibangun agar permasalahan tersebut cepat teratasi. Dengan menggunakan metode ini masyarakat akan terlatih untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sehingga masalah tersebut tidak sebagai penghambat pembangunan di desa.



Gambar 2. Pelatihan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa Secara Partisipatif

Hasil evaluasi dari kegiatan ini adalah peserta aktif dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa sebagai bentuk komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu, meningkatnya kemampuan masyarakat dan perangkat desa dalam mengidentifikasi masalah serta menyusun program kerja sesuai dengan skala prioritas. Permasalahan-permasalahan pokok yang disampaikan berkaitan dengan masalah infrastruktur seperti jalan, rumah penduduk, selain itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan, serta pertanian dan perkebunan yang juga merupakan potensi desa selain pariwisata.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan pelatihan dalam membangun komitmen warga masyarakat, komitmen pengurus organisasi sosial warga, serta komitmen aparat pemerintahan desa dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa yang lebih partisipatif, setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan diadakan survei terhadap para peserta pelatihan, dimana hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar peserta (80%) menyatakan

berkomitmen untuk ikut berpartisipasi aktif dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa.

3. Kegiatan Pendampingan

Pendampingan perencanaan pembangunan dilakukan oleh seluruh tim pengabdian yang juga didampingi oleh mahasiswa. Berbagai bentuk pelayanan diberikan kepada mitra yang dalam hal ini adalah Perangkat Desa Wanagiri secara intensif untuk mendapatkan informasi-informasi yang memadai terkait dengan penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di desa sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, mengingat juga pendapatan asli desa yang belum terlalu besar ditambah kondisi pandemi covid-19.

Instrumen lain untuk menilai keberhasilan kegiatan pengabdian ini adalah berupa draft rencana pembangunan desa yang telah mengakomodasi kepentingan warga masyarakat yang mana hal itu dibuktikan dengan adanya rencana program kegiatan yang langsung menyasar pada kelompok masyarakat tersebut. Usulan tersebut diantaranya adalah pelatihan gong istri, tata boga, dan tata rias, infrastruktur (betonisasi jalan bergong 800M, Jalan Goa 675M, jalan Giri Tani 400 M, dan Jalan Munduk Pondok 1200 M), bedah rumah 67 Unit, Penerangan jalan 470 titik, instalasi listrik 30 titik, Tambahan PMT untuk balita pada saat posyandu, honor, pakaian olahraga untuk kader lansia. Dengan melakukan pendampingan yang intensif, para perangkat desa serta perwakilan kelompok masyarakat telah mampu melakukan perencanaan pembangunan secara partisipatif .





**Gambar 3. Pendampingan Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Desa secara
Partisipatif**

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengambil topik tentang pelatihan dan pendampingan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa melalui pengetahuan dan informasi mengenai proses penyusunan perencanaan pembangunan yang berprinsip partisipatif serta meningkatkan komitmen untuk turut berperan serta secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan sehingga perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan merefleksikan aspirasi dari seluruh masyarakat yang pada akhirnya hasil dari pembangunan desa tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga masyarakat di Desa Wanagiri. Dengan adanya keterlibatan yang aktif dari kelompok masyarakat serta keterbukaan dan sikap responsif perangkat desa dalam menerima aspirasi masyarakat, hal ini dapat berimplikasi pada perumusan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan ataupun kondisi desa tersebut. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini dapat terwujud berkat kerja sama yang baik dan sinergis antara anggota tim pengabdian dan perangkat desa Wanagiri yang telah menyediakan fasilitas yang memadai dalam menunjang kegiatan pelatihan dan pendampingan perencanaan partisipatif ini.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengambil tema optimalisasi peran serta warga masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa di Desa Wanagiri berjalan dengan lancar dan baik. Kegiatan tersebut banyak memberi manfaat kepada warga masyarakat dan perangkat desa yang mengikuti pelatihan karena kegiatan ini memberikan pengaruh pada peningkatan pemahaman terkait perencanaan partisipatif yang berdampak pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa yang sejalan dengan amanat undang-undang. Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, maka pembangunan desa yang akan dilaksanakan dapat benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang serta sesuai dengan kebutuhan desa yang berdampak pada hasil pembangunan desa tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga masyarakat Desa Wanagiri.

Dengan melihat manfaat yang sangat baik dari adanya kegiatan ini, maka diharapkan kegiatan serupa juga dapat dilaksanakan pada desa-desa yang lain dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan kondisi desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam Latif et al. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah*, 5(1), 1–15.
- Agustin, Merry et al. (2016). “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggungangkir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Dalam Publika* vol.4, no 1.

- Effendi, G. N. (2020). Factors That Influence Community Participation In Development Planning In Kasihan District, Bantul Regency, Yogyakarta. *TheJournalish: Social and Government*, 1(2), 38-48.
- Fadil, Fathurrahman et al. (2013). "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Volume II Edisi 2.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Haryadi, A. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu. *Katalogis*, 4(3).
- Laily, E. I. N. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif," kebijakan dan manajemen publik. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(3), 186–190.
- Manolang, E. S. (2013). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe). *Governance*, 5(1).
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192-200.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Ratna, R., & Dema, H. (2020). Kepemimpinan Pemerintahan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(2), 112-131.
- Susetiawan, S., Mulyono, D. C., & Roniardin, M. Y. (2018). Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 4(1), 109-118.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa